



WALI KOTA BANJARMASIN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN WALI KOTA BANJARMASIN  
NOMOR 16 TAHUN 2026  
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA BANJARMASIN  
NOMOR 18 TAHUN 2025 TENTANG PETA JABATAN DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, profesional, dan berorientasi pada peningkatan kinerja aparatur sipil negara sebagai perwujudan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, diperlukan penataan jabatan yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan organisasi
  - b. bahwa untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efektif dan responsif terhadap perkembangan kebutuhan organisasi serta peningkatan pelayanan kepada masyarakat, perlu dilakukan penyesuaian terhadap peta jabatan di lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin.
  - c. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 1 Tahun 2026 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah serta adanya kebutuhan penyesuaian formasi jabatan fungsional di lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin, dipandang perlu untuk melakukan perubahan terhadap Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 18 Tahun 2025 tentang Peta Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 79 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 18 Tahun 2025 tentang Peta Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin sebagai dasar pelaksanaan;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan

Kedua Atas Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 18 Tahun 2025 tentang Peta Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin;

Mengingat:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi

- Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
  13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 26);
  14. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 10 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penyusunan Kebutuhan Aparatur Sipil Negara (Berita

- Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 845);
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 45 Tahun 2022 tentang Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1047);
  16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54);
  17. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 1 Tahun 2026 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 95);
  18. Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 18 Tahun 2025 tentang Peta Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2025 Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 79 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 18 Tahun 2025 tentang Peta Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2025 Nomor 79);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan: PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA BANJARMASIN NOMOR 18 TAHUN 2025 TENTANG PETA JABATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN.**

**Pasal I**

Mengubah Lampiran Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 18 Tahun 2025 tentang Peta Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2025 Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 79 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 18 Tahun 2025 tentang Peta Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2025 Nomor 79) sehingga keseluruhan berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

**Pasal II**

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarmasin.

Ditetapkan di Banjarmasin  
pada tanggal 4 Maret 2026

WALI KOTA BANJARMASIN,



MUHAMMAD YAMIN HR

Diundangkan di Banjarmasin  
pada tanggal 4 Maret 2026

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN,



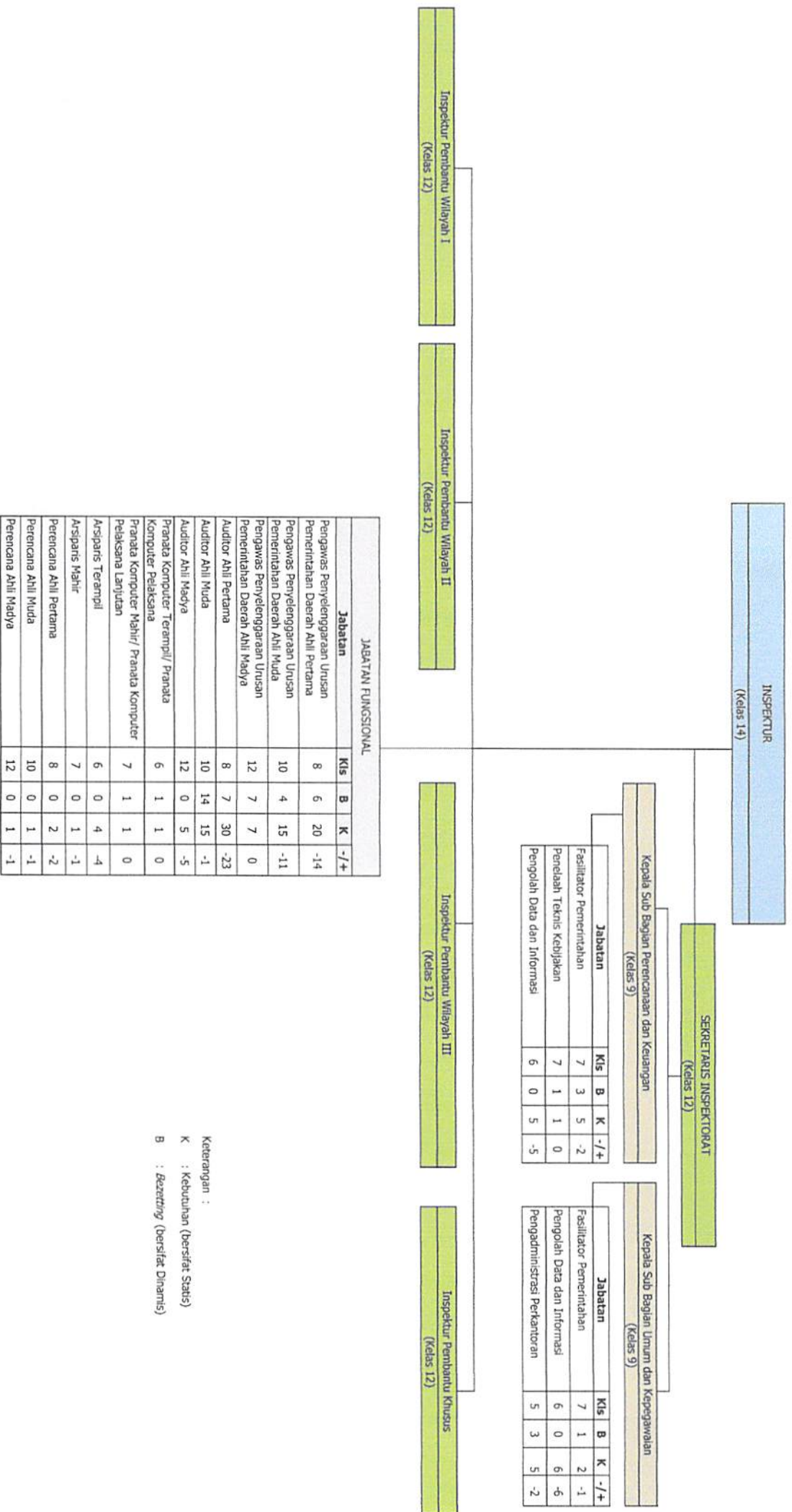
IKHSAN BUDIMAN

BERITA DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2026 NOMOR 16

LAMPIRAN  
PERATURAN WALI KOTA BANJARMASIN  
NOMOR 16 TAHUN 2026  
TENTANG  
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN  
WALI KOTA BANJARMASIN NOMOR 18  
TAHUN 2025 TENTANG PETA JABATAN DI  
LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA  
BANJARMASIN



PETA JABATAN INSPEKTORAT KOTA BANDARMASIN



JABATAN FUNGSIONAL				
Jabatan	Kis	B	K	-/+
Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Ahli Pertama	8	6	20	-14
Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Ahli Muda	10	4	15	-11
Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Ahli Madya	12	7	7	0
Auditor Ahli Pertama	8	7	30	-23
Auditor Ahli Muda	10	14	15	-1
Auditor Ahli Madya	12	0	5	-5
Pranata Komputer Terampil/ Pranata Komputer Pelaksana	6	1	1	0
Pranata Komputer Mahir/ Pranata Komputer Pelaksana Lanjutan	7	1	1	0
Arsparis Terampil	6	0	4	-4
Arsparis Mahir	7	0	1	-1
Perencana Ahli Pertama	8	0	2	-2
Perencana Ahli Muda	10	0	1	-1
Perencana Ahli Madya	12	0	1	-1

Keterangan :  
 K : Keburukan (bersifat Statis)  
 B : Bezetting (bersifat Dinamis)

PETA JABATAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH KOTA BANJAR MASIN

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH

(Kelas 14)

SEKRETARIS BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH

(Kelas 12)

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

(Kelas 9)

Jabatan	Kelas	B	K	+/-
Penelaah Teknis Kebijakan	7	0	1	-1
Pengolah Data dan Informasi	6	1	2	-1
Pengadministrasi Perkantoran	5	1	1	0
Operator Layanan Operasional	3	1	1	0

Kepala Sub Bagian Perencanaan

(Kelas 9)

Jabatan	Kelas	B	K	+/-
Penelaah Teknis Kebijakan	7	1	1	0
Penata Layanan Operasional	7	1	1	0
Pengolah Data dan Informasi	6	0	1	-1

Kepala Sub Bagian Keuangan

(Kelas 9)

Jabatan	Kelas	B	K	+/-
Penelaah Teknis Kebijakan	7	1	2	-1
Pengolah Data dan Informasi	6	1	3	-2
Pengadministrasi Perkantoran	5	0	1	-1

Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Infrastruktur dan Kewilayahan

(Kelas 11)

Jabatan	Kelas	B	K	+/-
Penelaah Teknis Kebijakan	7	1	4	-3
Pranata Kewilayahan	7	1	1	0
Pengolah Data dan Informasi	6	0	4	-4

Kepala Bidang Riset Daerah

(Kelas 11)

Jabatan	Kelas	B	K	+/-
Penelaah Teknis Kebijakan	7	0	1	-1
Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	7	1	2	-1
Pengolah Data dan Informasi	6	0	1	-1

Kepala Bidang Inovasi Daerah

(Kelas 11)

Jabatan	Kelas	B	K	+/-
Penelaah Teknis Kebijakan	7	0	1	-1
Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	7	2	2	0
Pengolah Data dan Informasi	6	0	2	-2

Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Ekonomi dan Budaya

(Kelas 11)

Jabatan	Kelas	B	K	+/-
Penelaah Teknis Kebijakan	7	2	4	-2
Pengolah Data dan Informasi	6	0	4	-4

Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Sosial, Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

(Kelas 11)

Jabatan	Kelas	B	K	+/-
Penelaah Teknis Kebijakan	7	5	10	-5
Pengolah Data dan Informasi	6	0	4	-4

JABATAN FUNGSIONAL

Jabatan	Kelas	B	K	+/-
Perencana Ahli Pertama	8	2	15	-13
Perencana Ahli Muda	10	8	10	-2
Perencana Ahli Madya	12	0	8	-8
Peneliti Ahli Pertama	8	1	1	0
Peneliti Ahli Muda	9	3	4	-1
Pranata Komputer Terampil/Pranata Komputer Pelaksana	6	1	1	0
Pranata Komputer Mahir/Pranata Komputer Pelaksana Lanjutan	7	1	2	-1
Pranata Komputer Penyelia	8	0	1	-1
Arsiparis Terampil	6	0	1	-1
Analisis Kebijakan Ahli Pertama	8	0	2	-2
Analisis Kebijakan Ahli Muda	10	0	3	-3
Analisis Kebijakan Ahli Madya	12	0	2	-2
Surveyor Pemetaan Terampil	6	0	2	-2
Surveyor Pemetaan Mahir	7	0	2	-2
Surveyor Pemetaan Penyelia	8	1	2	-1
Surveyor Pemetaan Ahli Pertama	8	1	1	0
Surveyor Pemetaan Ahli Muda	10	0	1	-1

Keterangan :

K : Keudukan (bersifat Statis)

B : *Bezetting* (bersifat Dinamis)

PETA JABATAN DINAS SOSIAL KOTA BANJARMASIN

KEPALA DINAS SOSIAL  
(Kelas 14)

SEKRETARIS DINAS SOSIAL  
(Kelas 12)

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian  
(Kelas 9)

Jabatan	Kelas	B	K	+/-
Penelaah Teknis Kebijakan	7	0	1	-1
Penata Layanan Operasional	7	1	1	0
Pengolah Data dan Informasi	6	0	2	-2
Pengadministrasi Perkantoran	5	1	3	-2

Kepala Sub Bagian Perencanaan  
(Kelas 9)

Jabatan	Kelas	B	K	+/-
Penelaah Teknis Kebijakan	7	1	2	-1
Pengolah Data dan Informasi	6	0	2	-2
Pengadministrasi Perkantoran	5	0	1	-1

Kepala Sub Bagian Keuangan  
(Kelas 9)

Jabatan	Kelas	B	K	+/-
Penelaah Teknis Kebijakan	7	1	2	-1
Pengolah Data dan Informasi	6	1	3	-2
Pengadministrasi Perkantoran	5	0	1	-1

Kepala Bidang Pengembangan Data dan Informasi Keajaiberaan Sosial  
(Kelas 11)

Jabatan	Kelas	B	K	+/-
Penata Kelela Sistem dan Teknologi Informasi	7	0	2	-2
Pengolah Data dan Informasi	6	0	4	-4
Pengadministrasi Perkantoran	5	0	2	-2

Bidang Perlindungan, Jaminan Sosial dan Peningkatan Kemiskinan  
(Kelas 11)

Jabatan	Kelas	B	K	+/-
Penata Layanan Operasional	7	1	2	-1
Penelaah Teknis Kebijakan	7	1	1	0
Pengolah Data dan Informasi	6	0	5	-5
Pengadministrasi Perkantoran	5	1	3	-2

Bidang Rehabilitasi Sosial  
(Kelas 11)

Jabatan	Kelas	B	K	+/-
Penelaah Teknis Kebijakan	7	1	3	-2
Fasilitator Bahasa Isyarat	7	0	2	-2
Pengolah Data dan Informasi	6	0	3	-3
Pengadministrasi Perkantoran	5	1	3	-2
Pengelola Umum Operasional	3	0	1	-1

Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial  
(Kelas 11)

Jabatan	Kelas	B	K	+/-
Penelaah Teknis Kebijakan	7	0	2	-2
Pengolah Data dan Informasi	6	1	5	-4
Pengadministrasi Perkantoran	5	0	2	-2

JABATAN FUNKSIONAL

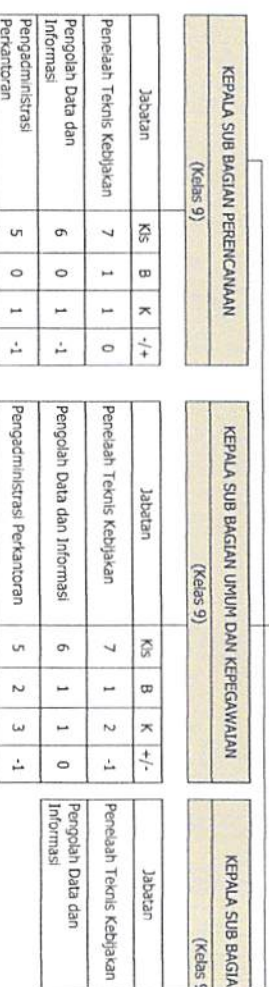
JABATAN	KELAS	B	K	+/-
Pekerja Sosial Ahli Pertama	8	4	8	-4
Pekerja Sosial Ahli Muda	10	3	6	-3
Pekerja Sosial Ahli Madya	12	0	5	-5
Pranata Komputer Terampil/ Pranata Komputer Pelaksana	6	3	3	0
Pranata Komputer Mahir/ Pranata Komputer Pelaksana Lanjutan	7	2	2	0
Penyuluh Sosial Ahli Pertama	8	2	8	-6
Penyuluh Sosial Ahli Muda	10	0	5	-5
Penyuluh Sosial Ahli Madya	12	0	3	-3
Perencana Ahli Pertama	8	0	2	-2
Perencana Ahli Muda	10	0	1	-1
Perencana Ahli Madya	12	0	1	-1

Keterangan :  
K : Kebutuhan (bersifat Statis)  
B : Bersifat Dinamis (bersifat Dinamis)

PETA JABATAN DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN TENAGA KERJA KOTA BANDARMASIN

KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN TENAGA KERJA  
(Kelas 14)

SEKRETARIS DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN TENAGA KERJA  
(Kelas 12)



KEPALA BIDANG KOPERASI  
(Kelas 11)

KEPALA BIDANG USAHA MIKRO  
(Kelas 11)

KEPALA BIDANG PEMBINAAN, PELATIHAN DAN PEMERATAAN KERJA  
(Kelas 11)

KEPALA BIDANG PEMBINAAN HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN JAMINAN SOSIAL  
(Kelas 11)

Jabatan	Kis	B	K	K	-/+
Penelaah Teknis Kebijakan	7	0	2	2	-2
Fasilitator Perdagangan	7	1	1	0	0
Pengolah Data dan Informasi	6	0	3	-3	-3
Pengadministrasi Perkantoran	5	1	3	-2	-2

Jabatan	Kis	B	K	K	-/+
Penelaah Teknis Kebijakan	7	2	5	-3	-3
Pengolah Data dan Informasi	6	0	1	-1	-1
Pengelola Layanan Operasional	6	2	2	0	0
Pengadministrasi Perkantoran	5	0	1	-1	-1

Jabatan	Kis	B	K	K	-/+
Penelaah Teknis Kebijakan	7	1	6	-5	-5
Fasilitator Pemerintahan	7	0	1	-1	-1
Pengolah Data dan Informasi	6	0	1	-1	-1
Pengadministrasi Perkantoran	5	0	1	-1	-1

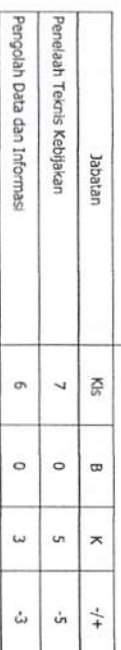
Jabatan	Kis	B	K	K	-/+
Penelaah Teknis Kebijakan	7	2	5	-3	-3
Fasilitator Perdagangan	7	1	1	0	0
Pengolah Data dan Informasi	6	0	1	0	0
Pengadministrasi Perkantoran	5	0	3	-3	-3

JABATAN FUNSIONAL					
Jabatan Fungsional	Ks	B	K	K	-/+
Instruktur Ahli Madya	12	1	2	-1	-1
Instruktur Ahli Muda	10	2	7	-5	-5
Instruktur Ahli Pertama	8	2	7	-5	-5
Instruktur Penyelia	8	0	2	-2	-2
Instruktur Pelaksana Lanjutan	7	0	2	-2	-2
Instruktur Pelaksana	6	0	1	-1	-1
Pengantar Kerja Ahli Madya	12	0	2	-2	-2
Pengantar Kerja Ahli Muda	10	1	4	-3	-3
Pengantar Kerja Ahli Pertama	8	2	5	-3	-3
Mediator Hubungan Industrial Ahli Madya	12	0	3	-3	-3
Mediator Hubungan Industrial Ahli Muda	10	2	4	-2	-2
Mediator Hubungan Industrial Ahli Pertama	8	0	6	-6	-6
Pranata Komputer Mahir/ Pranata Komputer Pelaksana Lanjutan	7	0	1	-1	-1
Pranata Komputer Terampil/ Pranata Komputer Pelaksana	6	0	1	-1	-1
Pengawas Koperasi Ahli Madya	12	1	3	-2	-2
Pengawas Koperasi Ahli Muda	10	2	8	-6	-6
Pengawas Koperasi Ahli Pertama	8	5	11	-6	-6
Pengembang Kewirausahaan Ahli Pertama	8	2	15	-13	-13
Pengembang Kewirausahaan Ahli Muda	10	1	10	-9	-9
Pengembang Kewirausahaan Ahli Madya	12	1	2	-1	-1
Aspiran Terampil	6	0	1	-1	-1
Analisis Kebijakan Ahli Pertama	8	0	1	-1	-1
Analisis Kebijakan Ahli Muda	10	0	1	-1	-1
Perencana Ahli Pertama	8	0	2	-2	-2
Perencana Ahli Muda	10	0	1	-1	-1
Perencana Ahli Madya	12	0	1	-1	-1

Keterangan :

K : Kebutuhan (bersifat Statis)

B : Berzending (bersifat Dinamis)



PETA JABATAN DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK KOTA BANJARMASIN

KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK  
(Kelas 14)

SEKRETARIS DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK  
(Kelas 12)

Jabatan Fungsional	Kelas	B	K	K	+/-
Pranata Komputer Ahli Madya	11	0	2	-2	
Pranata Komputer Ahli Muda	9	4	7	-3	
Pranata Komputer Ahli Pertama	8	13	18	-5	
Pranata Komputer Penyelia	8	0	5	-5	
Pranata Komputer Mahir/Pranata Komputer Pelaksana Lanjutan	7	2	12	-10	
Pranata Komputer Terampil/Pranata Komputer Pelaksana	6	6	6	0	
Statistisi Ahli Pertama	8	2	4	-2	
Statistisi Ahli Muda	9	0	2	-2	
Statistisi Ahli Madya	11	0	1	-1	
Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama	8	0	16	-16	
Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda	9	4	12	-8	
Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Madya	11	0	5	-5	
Aspiraris Terampil	6	0	1	-1	
Aspiraris Mahir	7	0	2	-2	
Sandiman Ahli Madya	12	0	1	-1	
Sandiman Ahli Muda	10	0	1	-1	
Sandiman Ahli Pertama	8	0	2	-2	
Manggota Informatika Ahli Muda	10	0	1	-1	
Manggota Informatika Ahli Pertama	8	0	2	-2	
Perencana Ahli Pertama	8	0	2	-2	
Perencana Ahli Muda	10	0	1	-1	

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawainan (Kelas 9)				
Jabatan	Kelas	B	K	+/-
Peneleah Teknis Kebijakan	7	1	2	-1
Pengolah Data dan Informasi	6	0	1	-1
Pengadministrasi Perkantoran	5	0	1	-1
Operator Layanan Operasional	5	0	2	-2

Kepala Sub Bagian Perencanaan (Kelas 9)				
Jabatan	Kelas	B	K	+/-
Peneleah Teknis Kebijakan	7	2	2	0
Pengolah Data dan Informasi	6	0	1	-1

Kepala Sub Bagian Keuangan (Kelas 9)				
Jabatan	Kelas	B	K	+/-
Peneleah Teknis Kebijakan	7	1	3	-2
Pengolah Data dan Informasi	6	0	2	-2
Pengadministrasi Perkantoran	5	1	1	0

Kepala Bidang Manajemen Pemerintahan Berbasis Elektronik  
(Kelas 11)

Jabatan	Kelas	B	K	K	+/-
Punata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	7	0	3	-3	
Peneleah Teknis Kebijakan	7	0	3	-3	
Pengolah Data dan Informasi	6	0	5	-5	
Pengelola Layanan Operasional	6	0	1	-1	
Operator Layanan Operasional	5	0	1	-1	

Kepala Bidang Statistik dan Tata Kelola Pemerintahan Digital  
(Kelas 11)

Jabatan	Kelas	B	K	K	+/-
Punata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	7	0	1	-1	
Peneleah Teknis Kebijakan	7	1	3	-2	
Pengolah Layanan Operasional	6	0	1	-1	
Pengolah Data dan Informasi	6	0	6	-6	
Pengadministrasi Perkantoran	5	0	1	-1	

Kepala Bidang Pemasangan, Aplikasi dan Informatika  
(Kelas 11)

Jabatan	Kelas	B	K	K	+/-
Punata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	7	0	3	-3	
Peneleah Teknis Kebijakan	7	0	3	-3	
Pengolah Data dan Informasi	6	1	5	-4	
Pengelola Layanan Operasional	6	0	1	-1	

Kepala Bidang Komunikasi Informasi Publik dan Komunitas  
(Kelas 11)

Jabatan	Kelas	B	K	K	+/-
Peneleah Teknis Kebijakan	7	1	3	-2	
Pengolah Data dan Informasi	6	0	7	-7	
Jurnalis	6	0	3	-3	
Pengelola Siaran	6	0	2	-2	
Pengelola Layanan Operasional	6	0	3	-3	
Pengadministrasi Perkantoran	5	0	2	-2	

Keterangan :  
K : Keahlian (bersifat Stabs)  
B : *Beefing* (bersifat Dinas)

PETA JABATAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA BANJARMASIN

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUN DAN PERLINDUNGAN ANAK

(Kelas 14)

SEKRETARIS DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUN DAN PERLINDUNGAN ANAK

(Kelas 12)

Kepala Sub Bagian Perencanaan

(Kelas 9)

Kepala Sub Bagian Keuangan

(Kelas 9)

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

(Kelas 9)

Jabatan	KIS	B	K	-/+
Penelaah Teknis Kebijakan	7	1	2	-1
Pengolah Data dan Informasi	6	0	1	-1
Pengadministrasi Perkantoran	5	0	1	-1

Jabatan	KIS	B	K	-/+
Penelaah Teknis Kebijakan	7	2	2	0
Pengolah Data dan Informasi	6	0	3	-3

Jabatan	KIS	B	K	-/+
Penelaah Teknis Kebijakan	7	1	1	0
Penata Kelembagaan Sistem dan Teknologi Informasi	7	1	1	0
Pengolah Data dan Informasi	6	0	1	-1
Pengadministrasi Perkantoran	5	2	2	0

Jabatan Fungsional

Jabatan	KIS	B	K	-/+
Analisis Kebijakan Ahli Pertama	8	0	3	-3
Analisis Kebijakan Ahli Muda	10	5	10	-5
Analisis Kebijakan Ahli Madya	12	0	5	-5
Aspirans Terampil	6	0	1	-1
Aspirans Madya	7	0	1	-1
Perencana Ahli Pertama	8	0	2	-2
Perencana Ahli Muda	10	0	1	-1

Jabatan Fungsional

Jabatan	KIS	B	K	-/+
Penata Komputer Terampil/ Penata Komputer Pelembaga	6	1	2	-1
Penata Komputer Madya/ Penata Komputer Pelembaga Lanjutan	7	0	1	-1
Psikolog Klinis Ahli Pertama	8	1	2	-1
Pekerja Sosial Ahli Pertama	8	0	3	-3
Pekerja Sosial Ahli Muda	10	2	2	0
Pekerja Sosial Ahli Madya	12	0	1	-1

Kepala Bidang Kualitas Hidup Perempuan

(Kelas 11)

Jabatan	KIS	B	K	-/+
Penata Kelembagaan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	7	1	2	-1
Penelaah Teknis Kebijakan	7	1	1	0
Penata Kelembagaan Sistem dan Teknologi Informasi	7	0	1	-1
Penata Layanan Operasional	7	0	1	-1
Pengelola Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	6	0	1	-1
Pengolah Data dan Informasi	6	0	4	-4
Pengadministrasi Perkantoran	5	0	1	-1

Kepala Bidang Pemenuhan Hak Anak

(Kelas 11)

Jabatan	KIS	B	K	-/+
Penata Kelembagaan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	7	0	1	-1
Penata Kelembagaan Sistem dan Teknologi Informasi	7	0	1	-1
Penelaah Teknis Kebijakan	7	2	3	-1
Pengolah Data dan Informasi	6	0	1	-1
Pengadministrasi Perkantoran	5	1	3	-2

Kepala Bidang Perlindungan Perempuan

(Kelas 11)

Jabatan	KIS	B	K	-/+
Penata Kelembagaan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	7	0	3	-3
Penata Kelembagaan Sistem dan Teknologi Informasi	7	1	1	0
Penelaah Teknis Kebijakan	7	1	1	0
Pengelola Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	6	0	1	-1
Pengolah Data dan Informasi	6	0	1	-1
Pengadministrasi Perkantoran	5	0	1	-1

Kepala Bidang Perlindungan Khusus Anak

(Kelas 11)

Jabatan	KIS	B	K	-/+
Penata Kelembagaan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	7	2	3	-1
Penata Kelembagaan Sistem dan Teknologi Informasi	7	1	1	0
Penelaah Teknis Kebijakan	7	0	1	-1
Pengelola Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	6	0	1	-1
Pengolah Data dan Informasi	6	0	1	-1
Pengadministrasi Perkantoran	5	0	1	-1

Kepala Unit Pelembagaan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak

(Kelas 9)

Jabatan	KIS	B	K	-/+
Konseker SOM	7	1	6	-5
Penata Layanan Operasional	7	0	2	-2
Pengadministrasi Perkantoran	5	0	2	-2

Keterangan :

K : Kedudukan (bersifat Statis)

B : *beceking* (bersifat Dinamis)

PETA JABATAN DINAS KEBUDAYAAN, KEPENDUDAHAN, OLAHRAGA DAN PARTIWISATA KOTA BANJARMAHIST

KEPALA DINAS KEBUDAYAAN, KEPENDUDAHAN, OLAHRAGA DAN PARTIWISATA  
(Kelas 14)

JABATAN FUNGSIONAL

Jabatan	Kls	B	K	-/+
Adyatama Keperawatan dan Ekonomi Kreatif Ahli Pertama	8	0	4	-4
Adyatama Keperawatan dan Ekonomi Kreatif Ahli Muda	10	5	5	0
Adyatama Keperawatan dan Ekonomi Kreatif Ahli Madya	12	0	1	-1
Perencana Ahli Pertama	8	0	2	-2
Perencana Ahli Muda	10	0	1	-1
Perencana Ahli Madya	12	0	1	-1
Pranata Komputer Terampil/Pranata Komputer Pelaksana	6	0	1	-1
Pranata Komputer Mahir / Lanjutan	7	0	1	-1
Aspirans Terampil	6	0	1	-1
Aspirans Mahir	7	0	2	-2

Jabatan	Kls	B	K	-/+
Analisis Kebijakan Ahli Pertama	8	0	3	-3
Analisis Kebijakan Ahli Muda	10	9	10	-1
Analisis Kebijakan Ahli Madya	12	0	5	-5
Pamong Budaya Terampil	6	0	7	-7
Pamong Budaya Mahir	7	0	7	-7
Pamong Budaya Penyelia	8	0	7	-7
Pamong Budaya Ahli Pertama	8	0	8	-8
Pamong Budaya Ahli Muda	9	2	8	-6
Pamong Budaya Ahli Madya	11	0	5	-5

SEKRETARIS DINAS KEBUDAYAAN, KEPENDUDAHAN, OLAHRAGA DAN PARTIWISATA  
(Kelas 12)

Kepala Sub Bagian Perencanaan  
(Kelas 9)

Jabatan	Kls	B	K	-/+
Penelaah Teknis Kebijakan	7	2	2	0
Pengolahan Data dan Informasi	6	0	1	0
Pengadministrasian Perkantoran	5	0	1	0

Kepala Sub Bagian Keuangan  
(Kelas 9)

Jabatan	Kls	B	K	-/+
Penelaah Teknis Kebijakan	7	1	2	-1
Penata Layanan Operasional	7	0	1	-1
Pengolahan Data dan Informasi	6	1	3	-2
Pengadministrasian Perkantoran	5	0	1	-1

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian  
(Kelas 9)

Jabatan	Kls	B	K	-/+
Penelaah Teknis Kebijakan	7	1	1	0
Penata Layanan Operasional	7	0	1	-1
Pengolahan Data dan Informasi	6	0	1	-1
Pengadministrasian Perkantoran	5	2	3	-1
Operator Layanan Operasional	5	0	3	-3

Kepala Bidang Kependudukan  
(Kelas 11)

Jabatan	Kls	B	K	-/+
Penelaah Teknis Kebijakan	7	4	12	8
Pengolahan Data dan Informasi	6	1	6	5

Kepala Bidang Olahraga  
(Kelas 11)

Jabatan	Kls	B	K	-/+
Penelaah Teknis Kebijakan	7	4	11	7
Penata Layanan Operasional	7	0	1	1
Pengolahan Data dan Informasi	6	0	6	6

Kepala Bidang Pariwisata  
(Kelas 11)

Jabatan	Kls	B	K	-/+
Penelaah Teknis Kebijakan	7	2	12	-10
Fasilitator Perdagangan	7	0	1	-1
Pengolahan Data dan Informasi	6	2	9	-7
Pengelola Layanan Operasional	5	0	1	-1
Pengadministrasian Perkantoran	5	0	2	-2

Kepala Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif  
(Kelas 11)

Jabatan	Kls	B	K	-/+
Penelaah Teknis Kebijakan	7	2	3	-1
Pengolahan Data dan Informasi	6	0	3	-3
Pengadministrasian Perkantoran	5	0	2	-2

Kepala Bidang Kebudayaan  
(Kelas 11)

Jabatan	Kls	B	K	-/+
Kurator	7	0	3	-3
Penelaah Teknis Kebijakan	7	0	4	-4
Konservator	7	0	1	-1
Edukatior	7	0	1	-1
Penata Layanan Operasional	7	0	1	-1
Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	7	0	1	-1
Pengelola Layanan Operasional	6	0	1	-1
Registral	6	0	1	-1
Pengolah Data dan Informasi	6	1	9	-8
Penata Perencanaan	5	0	1	-1
Pengadministrasian Perkantoran	5	1	5	-4
Juru Pelihara Cagar Budaya	1	0	2	-2

Keterangan :  
K : kegunaan  
K : Penalaran  
B : Berprestasi  
(bersifat Dinamis)

Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Kawasan Wisata  
(Kelas 9)

Kepala Sub Bagian Tata Usaha Unit Pelaksana Teknis Daerah Kawasan Wisata  
(Kelas 8)

Jabatan	Kls	B	K	-/+
Penelaah Teknis Kebijakan	7	2	10	-8
Pengolahan Data dan Informasi	6	0	10	-10
Operator Layanan Operasional	5	1	19	-18
Pengadministrasian Perkantoran	5	1	3	-2

**PETA JABATAN DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KOTA BANJARMASIN**

KEPALA DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN  
**(Kelas 14)**

SEKRETARIS DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN  
**(Kelas 12)**

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian  
**(Kelas 9)**

Kepala Sub Bagian Perencanaan  
**(Kelas 9)**

Kepala Sub Bagian Keuangan  
**(Kelas 9)**

JABATAN FUNGSIONAL				
JABATAN	KELAS	B	K	+/-
Pranata Komputer Terampil / Pranata Komputer Pelaksana	6	1	2	-1
Pranata Komputer Mahir / Pranata Komputer Pelaksana Lanjutan	7	3	3	0
Pranata Komputer Penyelia	8	0	2	-2
Penera Terampil	7	0	3	-3
Penera Mahir	8	1	3	-2
Penera Penyelia	9	0	3	-3
Penera Ahli Pertama	8	0	4	-4
Penera Ahli Muda	10	4	4	0
Penera Ahli Madya	12	0	2	-2
Pengamat Tera Terampil	6	0	1	-1
Pengamat Tera Mahir	7	0	1	-1
Pengamat Tera Penyelia	8	0	1	-1
Pengawas Perdagangan Ahli Pertama/ Pengawas Kemetrolagian Pertama	8	0	3	-3
Pengawas Perdagangan Ahli Muda/ Pengawas Kemetrolagian Muda	10	0	3	-3
Pengawas Perdagangan Ahli Madya/ Pengawas Kemetrolagian Madya	12	1	1	0
Arsiparis Terampil	6	0	1	-1
Analisis Perdagangan Ahli Pertama	8	0	3	-3
Analisis Perdagangan Ahli Muda	10	3	2	1
Analisis Perdagangan Ahli Madya	12	0	1	-1
Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan Pertama	8	0	5	-5
Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan Muda	9	2	3	-1
Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan Madya	11	0	1	-1
Surveyor Pemetaan Terampil	6	0	1	-1
Perencana Ahli Pertama	8	0	2	-2
Perencana Ahli Muda	10	0	1	-1
Perencana Ahli Madya	12	0	1	-1

JABATAN	Kelas	B	K	+/-
Penelaah Teknis Kebijakan	7	1	1	0
Penata Layanan Operasional	7	1	1	0
Pengolah Data dan Informasi	6	1	1	0
Pengadministrasi Perkantoran	5	1	1	0
Pengelola Umum Operasional	3	0	1	-1
Operator Layanan Operasional	3	0	1	-1

JABATAN	Kelas	B	K	+/-
Penelaah Teknis Kebijakan	7	0	1	-1
Pengolah Data dan Informasi	6	0	1	-1
Pengelola Layanan Operasional	6	0	1	-1

JABATAN	Kelas	B	K	+/-
Penelaah Teknis Kebijakan	7	0	2	-2
Penata Layanan Operasional	7	0	1	-1
Pengolah Data dan Informasi	6	1	3	-2

Kepala Bidang Penguatan dan Pengembangan Perdagangan (Kelas 11)					
Jabatan	Kelas	B	K	K	+/-
Fasilitator Perdagangan	7	2	3		-1
Penelaah Teknis Kebijakan	7	1	2		-1
Penata Layanan Operasional	7	0	1		-1
Pengolah Data dan Informasi	6	1	2		-1
Pengadministrasi Perkantoran	5	0	1		-1

Kepala Bidang Kemetrolgian (Kelas 11)					
Jabatan	Kelas	B	K	K	+/-
Penelaah Teknis Kebijakan	7	0	2		-2
Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	7	0	2		-2
Pengolah Data dan Informasi	6	0	4		-4
Pengadministrasi Perkantoran	5	4	5		-1

Kepala Bidang Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan dan Pasar (Kelas 11)					
Jabatan	Kelas	B	K	K	+/-
Penelaah Teknis Kebijakan	7	1	2		-1
Penata Layanan Operasional	7	0	2		-2
Pengolah Data dan Informasi	6	1	2		-1
Pengelola Layanan Operasional	6	1	1		0
Pengadministrasi Perkantoran	5	2	3		-1
Operator Layanan Operasional	3	1	1		0

Kepala Bidang Perindustrian (Kelas 11)					
Jabatan	Kelas	B	K	K	+/-
Penelaah Teknis Kebijakan	7	0	2		-2
Pengawas Industri	7	1	1		0
Pengolah Data dan Informasi	6	0	1		-1
Pengelola Layanan Operasional	6	0	1		-1
Pengadministrasi Perkantoran	5	0	1		-1

Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Pasar Sektor I (Kelas 9)					
--	--	--	--	--	--

Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Pasar Sektor II (Kelas 9)					
---	--	--	--	--	--

Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Pasar Sektor III (Kelas 9)					
--	--	--	--	--	--

Kepala Sub Bagian Tata Usaha Unit Pelaksana Teknis Daerah Pasar Sektor I (Kelas 8)					
Jabatan	Kelas	B	K	K	+/-
Pengadministrasi Perkantoran	5	0	2		-2
Operator Layanan Operasional	3	0	1		-1

Kepala Sub Bagian Tata Usaha Unit Pelaksana Teknis Daerah Pasar Sektor II (Kelas 8)					
Jabatan	Kelas	B	K	K	+/-
Pengadministrasi Perkantoran	5	1	2		-1
Operator Layanan Operasional	3	1	1		0

Kepala Sub Bagian Tata Usaha Unit Pelaksana Teknis Daerah Pasar Sektor III (Kelas 8)					
Jabatan	Kelas	B	K	K	+/-
Pengadministrasi Perkantoran	5	1	2		-1
Operator Layanan Operasional	3	0	1		-1

Keterangan :  
 K : Kebutuhan (bersifat Statis)  
 B : *Beetting* (bersifat Dinamis)

WALI KOTA BANJARMASIN,

MUHAMMAD YAMIN HR



PETA JABATAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA BANJARMAHIN

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG  
(Kelas 14)

SEKRETARIS DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG  
(Kelas 12)

JABATAN FUNKSIONAL				JABATAN FUNKSIONAL					
JABATAN	Kls	B	K	-/+	JABATAN	Kls	B	K	-/+
Pranata Komputer Terampil/ Pranata Komputer Peleaksana	6	1	3	-2	Ansisan Terampil	6	0	5	-5
Pranata Komputer Mahir/ Pranata Komputer Peleaksana Lanjutan	7	0	2	-2	Surveyor Pemetaan Terampil	6	0	3	-3
Penata Laksana Jalan dan Jembatan Terampil	6	0	1	-1	Surveyor Pemetaan Mahir	7	0	1	-1
Penata Laksana Jalan dan Jembatan Mahir	7	0	9	-9	Pembina Jasa Konstruksi Ahli Pertama	8	0	2	-2
Penata Laksana Jalan dan Jembatan Penyelia	9	0	8	-8	Pembina Jasa Konstruksi Ahli Muda	10	1	1	0
Penata Kelola Jalan dan Jembatan Ahli Pertama	8	0	11	-11	Pembina Jasa Konstruksi Ahli Madya	12	0	1	-1
Penata Kelola Jalan dan Jembatan Ahli Muda	10	2	9	-7	Penata Kelola Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman Ahli Pertama	8	1	3	-2
Penata Kelola Jalan dan Jembatan Ahli Madya	12	0	4	-4	Penata Kelola Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman Ahli Muda	10	1	1	0
Penata Laksana Sumber Daya Air Terampil/ Teknik Pengajaran Terampil	6	0	8	-8	Penata Kelola Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman Ahli Madya	12	0	1	-1
Penata Laksana Sumber Daya Air Mahir/ Teknik Pengajaran Mahir	7	0	6	-6	Penata Laksana Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman Terampil	6	0	1	-1
Penata Laksana Sumber Daya Air Penyelia/ Teknik Pengajaran Penyelia	9	0	4	-4	Penata Kelola Penyehatan Lingkungan Ahli Pertama	8	1	3	-2
Pengelola Sumber Daya Air Ahli Pertama/ Teknik Pengajaran Pertama	8	0	11	-11	Penata Kelola Penyehatan Lingkungan Ahli Muda	10	1	1	0
Pengelola Sumber Daya Air Ahli Muda/ Teknik Pengajaran Muda	10	6	8	-2	Penata Kelola Penyehatan Lingkungan Ahli Madya	12	0	1	-1
Pengelola Sumber Daya Air Ahli Madya/ Teknik Pengajaran Madya	12	0	4	-4	Perencana Ahli Pertama	8	0	2	-2
Penata Ruang Ahli Pertama	8	0	6	-6	Perencana Ahli Muda	10	0	2	-2
Penata Ruang Ahli Muda	10	2	3	-1	Perencana Ahli Madya	12	0	1	-1
Penata Ruang Ahli Madya	12	0	1	-1					

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian  
(Kelas 5)

Jabatan	Kls	B	K	-/+
Penataah Teknis Kebijakan	7	1	3	-2
Pengolah Data dan Informasi	6	1	3	-2
Pengadministrasi Perkantoran	5	1	3	-2

Kepala Sub Bagian Perencanaan  
(Kelas 9)

Jabatan	Kls	B	K	-/+
Penataah Teknis Kebijakan	7	2	4	-2
Pengolah Data dan Informasi	6	0	2	-2
Pengadministrasi Perkantoran	5	0	1	-1

Kepala Sub Bagian Keuangan  
(Kelas 9)

Jabatan	Kls	B	K	-/+
Penataah Teknis Kebijakan	7	2	4	-2
Pengolah Data dan Informasi	6	1	7	-6
Pengadministrasi Perkantoran	5	1	2	-1

Kepala Bidang Jalan dan Jembatan  
(Kelas 11)

Jabatan	Kls	B	K	-/+
Peneleah Teknis Kebijakan	7	6	9	-3
Pengelola Layanan Operasional	6	2	7	-5
Operator Layanan Operasional	5	0	6	-6
Pengadministrasi Perkantoran	5	3	6	-3

Kepala Bidang Pengawasan Bangunan  
(Kelas 11)

Jabatan	Kls	B	K	-/+
Penata Layanan Operasional	7	2	6	-4
Peneleah Teknis Kebijakan	7	1	3	-2
Penata Laksana Agraria dan Tata Ruang	6	0	3	-3
Pengelola Layanan Operasional	6	0	2	-2
Pengadministrasi Perkantoran	5	0	2	-2

Kepala Bidang Sungai  
(Kelas 11)

Jabatan	Kls	B	K	-/+
Pengamat Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air	7	3	5	-2
Pengelola Layanan Operasional	6	1	5	-4
Pengadministrasi Perkantoran	5	2	3	-1

Kepala Bidang Drainase  
(Kelas 11)

Jabatan	Kls	B	K	-/+
Pengamat Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air	7	3	4	-1
Pengelola Layanan Operasional	6	1	3	-2
Pengadministrasi Perkantoran	5	1	2	-1

Kepala Bidang Cipta Karya dan Jasa Konstruksi  
(Kelas 11)

Jabatan	Kls	B	K	-/+
Peneleah Teknis Kebijakan	7	2	4	-2
Penata Layanan Operasional	7	3	3	0
Pengawas Jaringan Utilitas	7	1	1	0
Pengelola Layanan Operasional	6	0	2	-2
Pengolan Debit dan Informasi	6	0	1	-1
Pengadministrasi Perkantoran	5	1	1	0

Kepala Bidang Penataan Ruang  
(Kelas 11)

Jabatan	Kls	B	K	-/+
Peneleah Teknis Kebijakan	7	1	4	-3
Penata Layanan Operasional	7	1	3	-2
Pengelola Layanan Operasional	6	0	1	-1
Penata Laksana Agraria dan Tata Ruang	6	0	2	-2
Pengadministrasi Perkantoran	5	1	3	-2

Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Swakelola Pemeliharaan Jalan dan Jembatan  
(Kelas 9)

Jabatan	Kls	B	K	-/+
Peneleah Teknis Kebijakan	7	0	1	-1
Operator Layanan Operasional	5	0	3	-3

Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Swakelola Pemeliharaan Sungai dan Drainase  
(Kelas 9)

Jabatan	Kls	B	K	-/+
Penata Layanan Operasional	7	1	1	0
Pengelola Layanan Operasional	6	1	1	0
Pengadministrasi Perkantoran	5	0	1	-1

Keterangan :  
K : Kebutuhan (bersifat Statis)  
B : Berseting (bersifat Dinamis)

PETA JABATAN BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA BANJARMASIN

